



## **Prinsip-Prinsip Pedoman tentang Kemitraan antara Pemerintah Subnasional, Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal**

Di tahun 2014, para gubernur dari negara bagian dan provinsi anggota Satuan Tugas Gubernur untuk Iklim dan Hutan (Satgas GCF)/[Governors' Climate and Forests Task Force \(GCF Task Force\)](#) mengadopsi sebuah terobosan yang diberi nama Deklarasi Rio Branco/[Rio Branco Declaration \(RBD\)](#) pada saat Rapat Tahunan Satgas GCF di Rio Branco, Brazil. RBD tersebut berkomitmen untuk mengurangi deforestasi dan mendorong tercapainya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan rendah emisi di seluruh yurisdiksi baik di negara bagian maupun provinsi anggota dimana pada saat bersamaan membangun kemitraan dan berbagi manfaat bersama masyarakat adat dan komunitas lokal dan berbasis hutan. Negara bagian dan provinsi anggota GCF ini mengakui bahwa masyarakat adat serta komunitas-komunitas lokal berbasis hutan seringkali menjadi pembuka jalan dalam membangun dan mempertahankan keberhasilan pendekatan-pendekatan teritorial terkait konservasi hutan dan pembangunan daerah yang rendah emisi. Terkait peran yang mereka miliki, pemimpin masyarakat adat dan komunitas lokal ini pun mengakui bahwa bekerja bersama pemerintah di seluruh tingkatan adalah kunci dalam upaya pengamanan wilayah dan hak asasi manusia dan kemanfaatan bagi komunitas mereka terkait konservasi hutan dan pembangunan rendah emisi. Anggota Satgas GCF beserta pemimpin masyarakat adat dan komunitas lokal mendukung Prinsip-Prinsip Kerja Sama dan Kemitraan di bawah ini:

1. Kami mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal yang berhubungan dengan tanah, wilayah, budaya, otonomi dan tata kelola mereka, seperti yang tertulis di dalam Konvensi 169 Organisasi Buruh Internasional tentang Masyarakat adat dan Masyarakat Adat, Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat adat (UNDRIP), Deklarasi New York untuk Hutan, Perjanjian Paris dan perjanjian internasional lainnya;
2. Kami menghargai kontribusi bersejarah yang diberikan oleh masyarakat adat dan komunitas lokal demi menjaga dan merawat hasil-hasil hutan dan layanan lingkungan hidup yang diberikan oleh hutan-hutan tersebut kepada masyarakat secara keseluruhan, melalui pengelolaan sumber daya tradisional, seperti manajemen hutan masyarakat, serta strategi- strategi manajemen wilayah yang modern;
3. Kami mengetahui, menghargai dan mendukung hubungan intrinsik yang dimiliki oleh komunitas tradisional dan komunitas lokal lainnya terhadap basis wilayah dan lingkungan hidup alami mereka, yang merupakan sumber utama bagi kemaslahatan dan kelangsungan hidup mereka dan integritas budayanya;
4. Kami berniat untuk memfasilitasi dan memperkuat masyarakat adat dan komunitas lokal ini dalam hal tata kelola kewilayahan, konservasi dan pengelolaan hutan, pelestarian dan penghormatan terhadap ilmu dan cara pandang tradisional mereka tentang dunia, termasuk di dalamnya konsep-konsep seperti "*buen vivir*", implementasi tanaman hidup, dan dukungan bagi

keberlangsungan hidup tradisional yang mendorong tercapainya integrasi pelestarian hutan dan pembangunan masyarakat;

5. Kami berkeinginan untuk berkontribusi kepada tujuan GCF yang lebih luas terkait penciptaan, pengawasan dan evaluasi pendekatan-pendekatan yurisdiksi subnasional yang adaptif, spesifik dalam konteks terhadap tata kelola hutan, menghindari deforestasi, pengembangan mata pencaharian dan pencapaian dalam Kontribusi yang Ditentukan secara Nasional di negara mereka masing-masing, dengan fokus terletak pada menghormati hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal;
6. Kami berkeinginan untuk memfasilitasi dan mendukung kerja sama antara pemerintah subnasional dan perwakilan pihak masyarakat adat dan komunitas lokal, yang sesuai definisinya adalah wakil dari kelompok-kelompok yang memiliki yurisdiksi atas wilayah tertentu beserta visi tentang manajemen wilayah tersebut;
7. Kami mendukung, memperkuat dan menjamin partisipasi dan representasi kewenangan dan organisasi perwakilan yang dimiliki oleh masyarakat adat dan komunitas lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait strategi yurisdiksi untuk pembangunan daerah yang rendah emisi dan pengurangan deforestasi dan degradasi;
8. Kami mendukung kebijakan-kebijakan nasional terkait kepemimpinan subnasional yang “dari bawah ke atas/*bottom up*” dalam hal pengurangan emisi yang berasal dari deforestasi dan degradasi dan pembangunan rendah emisi yang berpengaruh pada masyarakat adat dan komunitas lokal dan tata kelola lingkungan hidup di negara bagian dan provinsi anggota GCF;
9. Kami menghormati dan memastikan kesesuaian dengan Cancún Safeguards, termasuk Pernyataan Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Berwawasan/*Free, Prior and Informed Consent* (seperti yang disebutkan dalam UNDRIP dan Konvensi ILO 169) terkait konsultasi masyarakat adat dan komunitas lokal;
10. Seperti telah diatur dalam Deklarasi Rio Branco, kami menegaskan bahwa seluruh keuntungan dan manfaat yang didapatkan dari pembangunan daerah yang rendah emisi di tingkat subnasional dan pengurangan emisi dari program-program deforestasi hendaknya diberikan kepada masyarakat adat dan komunitas lokal, juga kepada pihak-pihak lain yang berkontribusi dalam upaya pengurangan emisi yang berasal dari deforestasi, menghargai kontribusi mereka terhadap pelestarian hutan;
11. Kami akan bekerja sama untuk merancang inisiatif dan jalur-jalur yang bisa digunakan untuk berbagi manfaat/keuntungan, perluasan mekanisme pendanaan, pengembangan kapasitas, dan konsultasi melalui Kelompok Kerja Global GCF untuk Masyarakat adat dan Komunitas Lokal dan juga melalui kelompok-kelompok kerja lainnya di wilayah-wilayah anggota GCF, bila memungkinkan;
12. Kami berkomitmen untuk memfasilitasi dan mendukung rancangan dan pelaksanaan mekanisme keuangan oleh masyarakat adat dan komunitas lokal melalui perwakilan yang berwenang dan organisasi yang berwenang; dan
13. Kami berkomitmen untuk mendukung langkah-langkah untuk memastikan perlindungan atas upaya-upaya untuk menjaga dan mempertahankan hutan oleh masyarakat adat dan komunitas lokal.